

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Chomzah, Ali Achmad. (2002). *Hukum Pertanahan*. Jakarta: Prestasi Pustaka.
- Dijk, Van. (2006). *Pengantar Hukum Adat Indonesia*. Terjemahan Oleh Mr.ASoehardi, Bandung: Penerbit Mandar Maju.
- Harsono, Boedi. (1994). *Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya, Jilid 1 Hukum Tanah*. Jakarta: Djambatan.
- Harsono, Boedi. (2003). *Menuju Penyempurnaan Hukum Tanah Nasional – Dalam Hubungannya Dengan TAP MPR RI IX/MPR/2001*. Jakarta: Penerbit Universitas Trisakti.
- I Gusti Ayu Gangga Santi Dewi. (2020) *Hukum Agraria di Indonesia*. Surabaya: CV. Jakad Media Publishing.
- Limbong, Benhard. (2012). *Hukum Agraria Nasional*. Jakarta Selatan: Margaretha Pusaka.
- Mertokusumo, Soedikno. (selanjutnya disebut Sudikno Mertokusumo-1), *Hukum dan Politik Agraria, Universitas Terbuka*. Jakarta: Karunika.
- Muchsin,dkk. (2007). *Hukum Agraria Indonesia*. Bandung: PT Rafika Aditama.
- Notonagoro. (1984). *Politik Hukum dan Pembangunan Agraria di Indonesia*, Jakarta: Penerbit PT Bina Aksara.
- Rosady, Ruslan. (2003). *Metode Penelitian Public Relations dan Komunikasi*. Jakarta : Rajawali Pers.

Supriadi. (2007). *Hukum Agraria*. Jakarta: Sinar Grafika.

Santoso, Urip. (2005). *Hukum Agraria dan Hak-Hak Atas Tanah*, Surabaya: Kencana.

Suhariningsih. (2008). *Tanah Terlantar: Asas dan Pembaharuan Konsep Menuju Penertiban*. Jakarta: Prestasi Pustaka.

Soetikinjo, Imam. (1994). *Politik Agraria Nasional*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press.

Thalib, Hambali. (2009). *Sanksi Pidana dalam Konflik Pertahanan, Kebijakan Alternatif Penyelesaian Konflik Pertanian di Luar Kodifikasi Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Prof. Dr. I Gede A. B. Wiranata, S.H., M.H., (2005). *Hukum Adat Indonesia Perkembang dari Masa ke Masa*. Jakarta: Citra Aditya Bakti.

Philipus M Hadjon., dan Tatiek Sri Djatmiati. *Argumentasi Hukum*, Yogyakarta : Gajah Mada University Press.

Wulansari, C. D., & Gunarsa, A. (2016). *Hukum adat Indonesia: suatu pengantar*. Jakarta: Refika Aditama.

B. JURNAL ATAU KARYA ILMIAH

Achmadi Abby, F. (2020). *Sengketa Pertanahan Hak Masyarakat Adat dengan Hak Guna Usaha (HGU) Perkebunan Sawit Di Kalimantan Selatan*.

Andora, H., & Fatimah, T. (2014). Pola Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat di Sumatera Barat (Sengketa antara Masyarakat dengan Investor). *Jurnal Ilmu Hukum Riau*, 4(1), 9086.

Fatimah, T., & Andora, H. (2010). Pola penyelesaian sengketa tanah ulayat di Sumatera Barat (sengketa antara masyarakat dengan investor). *Jurnal Ilmu Hukum*, 5(1), 11-28.

Hakimy, TI. El, 1980, *Tatanan Tanah di Wilayah Pedesaan Aceh*, laporan penelitian, Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh.

Ismail, I. (2010). Kedudukan dan Pengakuan Hak Ulayat Dalam Sistem Hukum Agraria Nasional. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, 12(1), 49-66.

Lakburlawal, M. A. (2016). *Akses Keadilan Bagi Masyarakat Adat Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat Yang Diberikan Hak Guna Usaha*. *ADHAPER: Jurnal Hukum Acara Perdata*, 2(1), 59-75.

Prasetyo, B. (2007). Pengakuan Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat (Antara Regulasi dan Implementasi). *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, 36(2).

Pujiriyani, D. W., & Puri, W. H. (2013). SUKU ANAK DALAM BATIN 9 DAN KONFLIK SERIBU HEKTAR LAHAN SAWIT ASIATIC PERSADA. *BHUMI: Jurnal Agraria dan Pertanahan*, (37), 122-141.

Yanto, F. (2019). Sejarah Pembinaan terhadap Suku Anak Dalam di Kabupaten Batanghari Provinsi Jambi (1970-2014). *Jurnal Ilmiah Dikdaya*, 9(2), 244-256.

C. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Ketentuan Dasar Pokok-pokok Agraria.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat.

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 18 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penatausahaan Hak Ulayat Kesatuan Masyarakat Hukum Adat.

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No.
P.17/MENLHK/SETJEN/KUM.1/8/2020 tentang Hutan Adat dan
Hutan Hak.